

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teoritis

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2014: 77).

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Cahyono, 2018:9). Dalam konteks dengan masyarakat, pemberdayaan mengacu pada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.

Pemberdayaan sebagai terjemahan *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu (a) *to give power or authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (b) *to give ability to* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan atau bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan keberdayaan seseorang (Randy dan Riant, 2017: 279-280).

Rusmiyati (2015: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya, atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kuntari, 2016: 12). Proses pemberdayaan meliputi menciptakan suasana kondusif (*enabling*), penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (*empowering*), bimbingan dan dukungan (*supporting*), serta memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang (*foresting*).

Winarni dalam Sulistiyani (2014:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Permendagri No.7 Tahun 2007).

Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dari, oleh, untuk, dan bersama dengan masyarakat (Mubarak, 2012: 377). Oleh karena itu, batas antara sasaran dan pelaku pemberdayaan masyarakat sangatlah tipis sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran adalah sekaligus sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mereka lakukan. Hal ini memiliki arti, menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja.

Dalam konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang semula obyek menjadi subyek. Dalam hal ini, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama dari hubungan yang asimetris antara subyek-obyek menjadi hubungan yang simetris yakni subyek-subyek (Suparjan dan Hempri, 2013:46).

Selain itu, proses pemberdayaan juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Dalam konteks ini, peran aparat pemerintah harus lebih diarahkan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah. Selain itu, aparat pemerintah harus lebih sebagai toko pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibandingkan sebagai sebuah kantor unit birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta partisipasi masyarakat (Suparjan dan Hempri S, 2013:50).

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri seua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto dan Soebianto, 2017: 100).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam mencapai suatu kemandirian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penerima pasif saja namun ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan pemerintah berperan sebagai fasilitator atau pelayan masyarakat.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalahmasalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, pikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Sulistiyani, 2014:80).

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemampuan konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kemampuan afektif merupakan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan-keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Pemberdayaan diupayakan menuju kemandirian klien yaitu suasana atau kondisi tertentu yang membuat individu atau kelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Rusmiyati, 2015:16).

Hasil yang diharapkan dari proses pemberdayaan adalah tumbuhnya kompetensi masyarakat (tanggung jawab sosial dan kapasitas masyarakat). Kompetensi tanggung jawab memiliki arti bahwa tanggung jawab perkembangan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Sementara terkait dengan kompetensi kapasitas, terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri (Suparjan dan Hempri, 2013:50).

Cahyono (2018:10) mengemukakan bahwa tujuan akhir pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian sasaran dalam masyarakat (individu, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat). Sedangkan Kuntari (2018:13) mengemukakan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat harus membuat

masyarakat menjadi swadiri, mampu mengurus dirinya sendiri; swadana, mampu membiayai keperluan sendiri; dan swasembada, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

Dari berbagai pendapat di atas, disimpulkan bahwa inti dari tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada kedermawanan dari pihak lain. Dalam hal ini masyarakat diharapkan bisa menjadi pribadi yang swadiri (mampu mengurus dirinya sendiri), swadana (mampu membiayai keperluan sendiri), dan swasembada (mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan).

c. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. “Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian” (Sulistiyani, 2014:83).

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan

masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan-keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berperan pasif, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Dalam konsep pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja. Wilson dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:122-123) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari:

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/ kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan.

3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/ perbaikannya.
5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Menurut Tim Delivery dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:125-127), tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap 1. Seleksi Lokasi
- 2) Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
- 3) Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat
 - a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif
 - b) Pengembangan kelompok
 - c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
 - d) Monitoring dan evaluasi partisipatif
- 4) Tahap 4. Pemandirian masyarakat.

Seleksi lokasi/ wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Setelah seleksi lokasi telah dilakukan, tahap selanjutnya ialah sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari diadakannya sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Tahap selanjutnya yaitu

proses pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal-hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengkaji potensi, permasalahan serta peluang-peluangnya; menyusun rencana kegiatan kelompok; menerapkan rencana kegiatan kelompok; serta memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus. Tahap terakhir adalah pemandirian masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan pada intinya ada tiga yaitu:

1. **Penyadaran masyarakat.** Penyadaran masyarakat dilaksanakan dengan sosialisasi. Tujuannya yaitu mengkomunikasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan serta menumbuhkan keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.
2. **Proses pemberdayaan masyarakat.** Dilaksanakan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf subjek.
3. **Pemandirian masyarakat.** Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.

2. Program Pendidikan Masyarakat

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 26 ayat (3), tercantum program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

a) Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan Kecakapan Hidup adalah kemampuan yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang saling berinteraksi diyakini sebagai unsur penting untuk lebih mandiri. Pendidikan Kecakapan Hidup berpegang pada prinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan (*learning to know*), belajar untuk dapat berbuat/bekerja (*learning to do*), belajar untuk menjadi orang yang berguna (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain (*learning to live together*).

Berdasarkan prinsip di atas, pada dasarnya pendidikan kecakapan hidup bermaksud memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya.

b) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak usia dini (0-6 tahun) yang dilakukan pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Secara umum tujuan dari program PAUD adalah memberikan dukungan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak usia dini serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini.

c) Pendidikan Kepemudaan

Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan yang sarannya khusus pemuda. Contohnya adalah dengan dibentuknya Kelompok Usia Pemuda Produktif (KUPP). Melalui program KUPP diharapkan para pemuda melalui kemampuan tertentu dalam bidang usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

d) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan pemberdayaan Perempuan diperuntukkan khusus untuk perempuan. Hal ini didasarkan atas masih banyak perempuan yang belum berdaya, padahal mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan.

e) Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan Keaksaraan yang dikembangkan saat ini adalah program keaksaraan fungsional yang pada dasarnya merupakan suatu pengembangan dari program keaksaraan sebelumnya. Program Keaksaraan Fungsional pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan keterampilan membaca, menulis, menghitung dan juga keterampilan berbicara, berpikir, mendengar dan berbuat.
- 2) Memecahkan masalah kehidupan Warga Belajar melalui kehidupannya dalam membaca, menulis, berhitung dan berbuat.
- 3) Menemukan jalan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan sehari-hari Warga Belajar.

- 4) Meningkatkan keberanian warga masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan belajarnya.
- 5) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pembaharuan agar dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di masyarakat.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui keterampilan dan kebudayaan di masyarakat.

f) Pendidikan Keterampilan

Program pendidikan keterampilan ditujukan untuk membekali warga belajar dalam bidang keterampilan yang dapat dijadikan bekal usaha. Dengan keterampilan yang dimiliki diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Program pendidikan keterampilan yang dapat dikembangkan dalam masyarakat adalah :

- 1) Keterampilan dalam bidang kemampuan bahasa;
 - 2) Keterampilan dalam bidang berumah tangga;
 - 3) Keterampilan dalam bidang penampilan diri;
 - 4) Keterampilan dalam bidang usaha;
 - 5) Keterampilan dalam bidang pekerjaan jasa;
- g) Pendidikan Kesetaraan

Dalam menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kesetaraan melalui pendidikan nonformal mendapat perhatian cukup tinggi. Hal ini terjadi karena program wajar dikdas 9 tahun tidak hanya bisa ditangani melalui pendidikan formal saja.

Banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena berbagai alasan, diantaranya tidak ada biaya, harus bekerja membantu orang tua. Mereka terpaksa putus sekolah baik pada tingkat SD, SMP, SMA.

Program kesetaraan yang ada di masyarakat yaitu mencakup : Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Paket B, Paket C. Menurut Zaenudin (2005) Kejar Paket A yaitu suatu upaya belajar dan bekerja secara sadar dan berencana dalam organisasi kelompok untuk meningkatkan pendidikan warga belajar, sehingga setara dengan sekolah dasar.

3. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (*family well-being*), namun saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016:6) menyatakan bahwa “Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat maupun negara”

Puspitawati (2016:12) menyatakan bahwa “Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik

materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis.

b. Aspek-aspek Ketahanan Keluarga

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Sunarti (2010:22) menyatakan bahwa “Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Jadi keluarga mempunyai:

- a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator:

pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi).

- b. Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah.
- c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016:8) menyatakan bahwa keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:

- (1) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- (2) Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi;
- (3) Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Iqbal (2017) menyatakan bahwa ketahanan keluarga terbagi menjadi lima yaitu 1) ketahanan agama, 2) ketahanan fisik, 3)

ketahanan psikis, 4) ketahanan ekonomi, dan 5) ketahanan sosial. Ketahanan agama adalah kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah, Indonesia sebagai Negara beragama tentu saja ketahanan agama ini penting, karena berkembangnya paham ateisme dan komunisme bisa membahayakan kelangsungan hidup sebuah keluarga bahkan negara, ibadah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kedekatan kepada Tuhan maka keluarga akan mampu mengatasi persoalan. Kedua adalah ketahanan fisik, yaitu kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik, karena bila fisiknya tidak sehat, maka akan menjadi masalah dan berdampak kepada kondisi psikis kehidupan keluarga.

Ketiga adalah ketahanan psikologis, keluarga. Ketahanan psikologis merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik dalam mengelola emosinya, mengelola stress, motivasi hidup, komunikasi dengan anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dalam berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik, karena banyak di dapati beberapa kasus perceraian terjadi karena persoalan komunikasi dan kesehatan mental pasangan yang bermasalah.

Keempat adalah ketahanan ekonomi, adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan hiburan, ketahanan ekonomi cukup penting karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik akan berdampak kepada kualitas hidup dan cara menyelesaikan masalah keluarga. Kelima adalah ketahanan sosial, ketahanan sosial merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai, budaya dan norma dalam masyarakat, ketahanan sosial meliputi bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial, karena dengan hubungan sosial yang sehat maka

sebuah keluarga dapat berkembang dengan baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di manapun dia berada sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik.

4. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU Nomor 18 Tahun 2008). Sementara itu menurut Notoatmodjo (2017:187) bahwa sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Menurut Manik (2017:67) menyatakan bahwa sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Menurut Mulia (2015:95), limbah padat yang lebih dikenal dengan istilah sampah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padatan atau semi padatan. Limbah padat merupakan campuran dari berbagai bahan baik yang tidak berbahaya seperti sisa makanan maupun yang berbahaya seperti limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berasal dari industri.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah suatu benda sisa kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam yang sudah tidak dipergunakan lagi dan dibuang.

b. Sumber Sampah

Wintoko (2012:3-5) mengemukakan bahwa sumber sampah digolongkan kepada dua kelompok besar yakni:

1) Sampah Domestik

Sampah domestik merupakan sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara langsung, misalnya

dari rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian, pemukiman, dan rumah sakit.

2) Sampah Non Domestik

Sampah non domestik yaitu sampah yang sehari-hari dihasilkan oleh manusia secara tidak langsung, seperti dari pabrik industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya.

Menurut Suwerda (2012: 9-11) sumber sampah ada 5 yaitu:

1) Sampah dari Rumah Tangga

Merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga yang berupa sisa hasil pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, gelas, kardus, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batu baterai, dan lain-lain.

2) Sampah dari Pertanian

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya yang berupa sampah yang mudah membusuk seperti rerumputan dan jerami.

3) Sampah Sisa Bangunan

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan berupa potongan kayu, triplek, bambu, semen bekas, batu bata, pecahan keramik, potongan besi, dan pecahan kaca.

4) Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran

Kegiatan perdagangan menghasilkan jenis sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah yang tidak mudah membusuk seperti kertas, kardus, plastik, kaleng dan lain-lain. Sedangkan kegiatan perkantoran menghasilkan sampah seperti kertas bekas, alat tulis, toner foto copy, pita printer, kotak tinta

printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain.

5) Sampah dari Industri

Kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang beragam tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan out produk yang dihasilkan.

Berdasarkan dari dua pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber sampah ada dua yaitu:

- 1) Sampah domestik merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari manusia secara langsung, terdiri dari sampah dari rumah tangga dan sampah dari perdagangan dan perkantoran.
- 2) Sampah non domestik merupakan sampah yang sehari-hari dihasilkan oleh manusia secara tidak langsung, terdiri dari sampah sisa bangunan, sampah dari pertanian, dan sampah dari industri.

c. Jenis-jenis Sampah

Sampah merupakan zat sisa dari kegiatan sehari-hari manusia sehingga jenisnya beragam. Mubarak dan Chayatin (2009:275-276) mengemukakan berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sampah dibedakan menjadi dua, yakni sampah organik dan anorganik. Sampah organik misalnya sisa makanan, daun, sayur dan buah, sedangkan sampah anorganik misalnya logam, pecah-belah, dan abu. Kemudian, berdasarkan bisa atau tidaknya dibakar sampah dibagi menjadi sampah yang mudah terbakar (kertas, plastik, daun kering, dan kayu) dan sampah yang tidak mudah terbakar (kaleng, besi, barang pecah belah, dan lain-lain). Sedangkan berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk sampah digolongkan menjadi sampah yang mudah membusuk (sisa makanan, potongan daging), dan yang sulit membusuk (plastik, karet gelang, kaleng).

Manik (2017:67) mengemukakan jenis sampah berdasarkan zat pembentuknya dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi limbah benda padat (*waste*), limbah cair atau air bekas (*sewage*), dan kotoran manusia (*human waste*).

Berdasarkan ciri atau karakteristiknya, sampah dibedakan menjadi:

- 1) *Garbage*, adalah sampah hasil pengolahan makanan yang umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, dan sebagainya.
- 2) *Rubbish*, adalah sampah yang berasal dari perkantoran, perdagangan, baik yang mudah terbakar seperti kertas, karton, plastik, dan lainnya maupun yang sulit terbakar seperti kaleng bekas, pecahan kaca, gelas, dan lainnya.
- 3) Sampah industri (*industrial wastes*), yaitu sampah yang berasal dari aktivitas industri atau hasil buangan pabrik-pabrik.
- 4) *Ashes* (abu), adalah hasil sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar seperti hasil pembakaran tumbuhan padi yang sudah dipanen pada masyarakat petani, hasil pembakaran sampah tebu, termasuk abu rokok dan sebagainya.
- 5) Sampah jalan (*street sweeping*), adalah sampah hasil pembersihan jalan yang terdiri atas campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu, dan sebagainya.
- 6) Sampah bangunan (*contruction wastes*), adalah sampah dari proses pembangunan gedung; pembangunan rumah dapat berupa puing-puing bekas, potongan kayu, besi, bambu, dan sebagainya.
- 7) Sampah bangkai binatang (*death animal*), adalah bangkai binatang yang mati karena faktor alam, tertabrak kendaraan, atau karena sengaja dibuang oleh orang.

- 8) Sampah bangkai kendaraan (*abandoned vehicle*), adalah bangkai kendaraan mobil, sepeda motor, sepeda ongel, dan sebagainya (Mubarak dan Chayatin, 2009:276).

Berdasarkan berbagai macam jenis sampah yang telah dikemukakan di atas, secara umum jenis sampah dibedakan menjadi 3 yaitu:

1) Sampah Organik

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah jenis ini secara keseluruhan dapat dengan mudah terurai melalui proses alami. Pada umumnya sampah organik adalah sampah yang bersumber dari rumah tangga dan pasar tradisional yang berupa kulit buah dan sisa sayuran. Selain itu yang termasuk dalam sampah organik diantaranya kertas, kayu atau ranting pohon, dan dedaunan kering.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Sampah jenis ini umumnya berbahan plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, dan sebagian lainnya dapat diuraikan oleh alam namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

3) Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sampah B3 merupakan jenis sampah yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah ini mengandung merkuri seperti kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi.

d. Pengertian Pengelolaan Sampah

Di Negara Indonesia, pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan penanganan sampah. Menurut Notoatmodjo (2017:191), pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut Mulia (2015:97), pengelolaan limbah padat (sampah) meliputi pengumpulan sampai dengan pemusnahan/ pembuangannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemusnahan/ pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

e. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (Permen LH Nomor 13 Tahun 2012). Dalam literatur lain, bank sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh *teller* bank sampah (Suwerda, 2012:22).

Dari kedua pengertian tersebut bank sampah diartikan sebagai tempat terjadinya kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas/*teller* terhadap penabung sampah yang telah melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

f. Tahapan Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Tabungan Sampah Di Bank Sampah

Menurut Suwerda (2012:43-45), penerapan sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah di bank sampah dibagi dalam beberapa tahap kegiatan, antara lain:

- a. Sosialisasi tahap pertama, bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga, dampak yang terjadi apabila sampah rumah tangga tidak dikelola dengan baik, dan konsep pengelolaan sampah dengan tabungan sampah.
- b. Membentuk tim pengelola bank sampah. Tim pengelola bank sampah akan bertanggungjawab dalam mengawal keberlangsungan program tabungan sampah di bank sampah.
- c. Melakukan pelatihan tentang tabungan sampah pada tim pengelola bank sampah. Pelatihan dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dapat menyatukan persepsi dari semua pengelola tentang mekanisme pelayanan di bank sampah baik secara individual maupun komunal.
- d. Mendirikan bank sampah sebagai wadah kegiatan. Yang perlu dipersiapkan adalah sarana-prasarana penunjangnya.
- e. Sosialisasi tahap kedua. Dilakukan dengan menyebarkan brosur dan pemasangan leaflet di tempat-tempat yang strategis untuk menarik perhatian warga.
- f. Melakukan pelayanan tabungan sampah.
- g. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bank sampah. pendampingan dan pembinaan terus menerus diperlukan, agar dapat memelihara dan meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengelola sampah, serta dapat menjaga

kegiatan tetap terarah sesuai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV). Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap sebulan sekali, untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan bulan sebelumnya dan merencanakan kegiatan pada bulan berikutnya.

5. Pengelolaan Bank Sampah Dapat Meningkatkan Ketahanan Keluarga

Pengelolaan bank sampah dapat mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal ini diungkapkan Suwerda (2012: 33-34) bahwa sistem pengelolaan sampah dengan bank sampah diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Kesehatan lingkungan
 - a. Dapat menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan bebas dari sampah
 - b. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara
 - c. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (anorganik) yang dapat mencemari tanah
 - d. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan lingkungan
2. Sosial ekonomi masyarakat
 - a. Dapat menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah
 - b. Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat
 - c. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mencari sampah

3. Bagi pendidikan

Memberi pendidikan kepada warga, terutama anak-anak supaya terbiasa memilah dan menabung sampah, sehingga mereka akan hidup di lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. menabung sampah membiasakan anak-anak untuk menabung sehingga mereka memahami betul arti pentingnya menabung.

4. Bagi pemerintah

Sebagai salah satu alternatif dalam mengelola sampah dari sekian banyak alternatif pengelolaan sampah, yang sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah masih dipusingkan dengan permasalahan sampah.

Dengan demikian bahwa Pengelolaan bank sampah harus diintegrasikan dengan gerakan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). sehingga warga akan memperoleh manfaat langsung, tidak hanya secara ekonomi, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat. Selain itu, bank sampah memberikan manfaat secara sosial dengan memperkuat kohesi sosial bagi keberadaan komunitas perempuan yang selama ini termarginalisasi dalam konstruksi sosial budaya. Manfaat lainnya secara ekonomis memberi dampak berupa tambahan penghasilan, dan manfaat untuk lingkungan dapat mengurangi timbulan sampah di perkotaan.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain, sebagai berikut:

- 1) Penelitian milik Mujahiddin (2014) yang berjudul “Upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah anorganik melalui bank sampah (Studi Kasus : Di Bank Sampah Simpan Jadi Emas Lingkungan V Blok B Lorong II Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)” dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan model analisis intraktif. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui tentang bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah anorganik di Bank Sampah SJM, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah anorganik di Bank Sampah SJM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan khususnya dalam pemberdayaan ekonomi. Dimana tabungan sampah yang dimiliki oleh para nasabah berhasil untuk membantu atau mencover kebutuhan belanja rumah tangga dan juga biaya oprasional pendidikan. Selain itu, perubahan sikap dan pandangan dalam pengelolaan sampah juga terjadi di tengah nasabah.

- 2) Penelitian milik Syafa'atur Rofi'ah (2013) yang berjudul "Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah (Studi di Bank Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta)" merupakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan), interview dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah meliputi sosialisasi, pemetaan wilayah, perencanaan, pelatihan, dan proses penanganan di tempat, proses pengumpulan sampah, proses pengangkutan sampah, proses pengelolaan sampah. Manfaat yang dirasakan masyarakat Suronatan, mereka sangat terbantu dengan adanya bank sampah karena bagi mereka sampah yang biasanya dibuang sia-sia menjadi barang yang bernilai ekonomis, menambah perekonomian keluarga, menambah silaturahmi antar masyarakat satu dengan yang lain.
- 3) Penelitian milik Eka Sri Hastuti (2015) yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sayuti Melik, Dusun Kadilobo, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengelola dan nasabah Bank sampah Sayuti

Melik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. 2) Hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Sayuti Melik dapat dilihat pada tiga aspek yaitu aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 3) Faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yaitu kegigihan pengelola; kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan; dan motivasi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan tambahan pendapatan keluarga. Adapun faktor yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yaitu masyarakat yang tertarik menjadi pengrajin sampah hanya sedikit; bank sampah sering tutup; masyarakat mulai bosan untuk menabungkan sampah ke bank sampah; dan belum ada mitra untuk memasarkan produk hasil daur ulang sampah.

- 4) Adi Firmansyah (2016) yang berjudul *Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Desa Karanganyar, Kabupaten Indramayu merupakan desa yang mendapatkan dampak dari tidak adanya pengelolaan sampah yang baik. Hampir setiap tahun dilanda banjir yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang kerap membuang sampah ke sungai. Akibatnya, hampir 80% lahan sawah dan empang yang dimiliki masyarakat terendam, sehingga menimbulkan kerugian petani padi dan pembudidaya lele. Atas dasar masalah tersebut, awal tahun 2015, beberapa kader lokal masyarakat Desa Karanganyar bersama PT Pertamina EP Jatibarang *Field* dan CARE LPPM IPB, mengembangkan

pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendirian Bank Sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui manfaat pendirian Bank Sampah, serta efektivitas Bank Sampah untuk menciptakan lingkungan yang lestari, khususnya di Desa Karanganyar. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2016, dengan teknik wawancara dan diskusi terfokus. Kajian ini menggunakan metode penelitian kaji tindak. Bank Sampah serbaguna Desa Karanglayung dipilih sebagai studi kasus kajian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Terciptanya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik; (2) Jumlah nasabah Bank Sampah terus meningkat setiap bulannya; (3) Terjadi peningkatan pendapatan kelompok pengelola Bank Sampah dan nasabahnya; (4) Berjalannya usaha kerajinan berbahan sampah yang dikelola oleh ibu-ibu di Desa Karanganyar; dan (5) Terbangunnya kemitraan para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah.

- 5) Muchammad Zamzami Elamin (2018) yang berjudul Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Permasalahan dari penelitian ini adalah proses pengelolaan sampah yang dilakukan belum masuk dalam kategori yang baik dan benar dikarenakan proses pengelolaan dilakukan dengan pembuangan yang tidak pada tempatnya dan dengan proses pembakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah yang ada di Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, *focus group discussion* yang melibatkan partisipan, wawancara terbuka, dan studi literatur. Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup, kepala desa, badan perwakilan desa, karang taruna, dan organisasi yang ada di desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Desa tersebut

masih kurang baik hal ini dikarenakan tidak adanya lahan untuk pembangunan tempat penampungan sementara, fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum baik, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Saran yang bisa diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar, jadwal rutin gotong royong bersih desa dan memasukkan anggaran untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk tempat penampungan sementara.

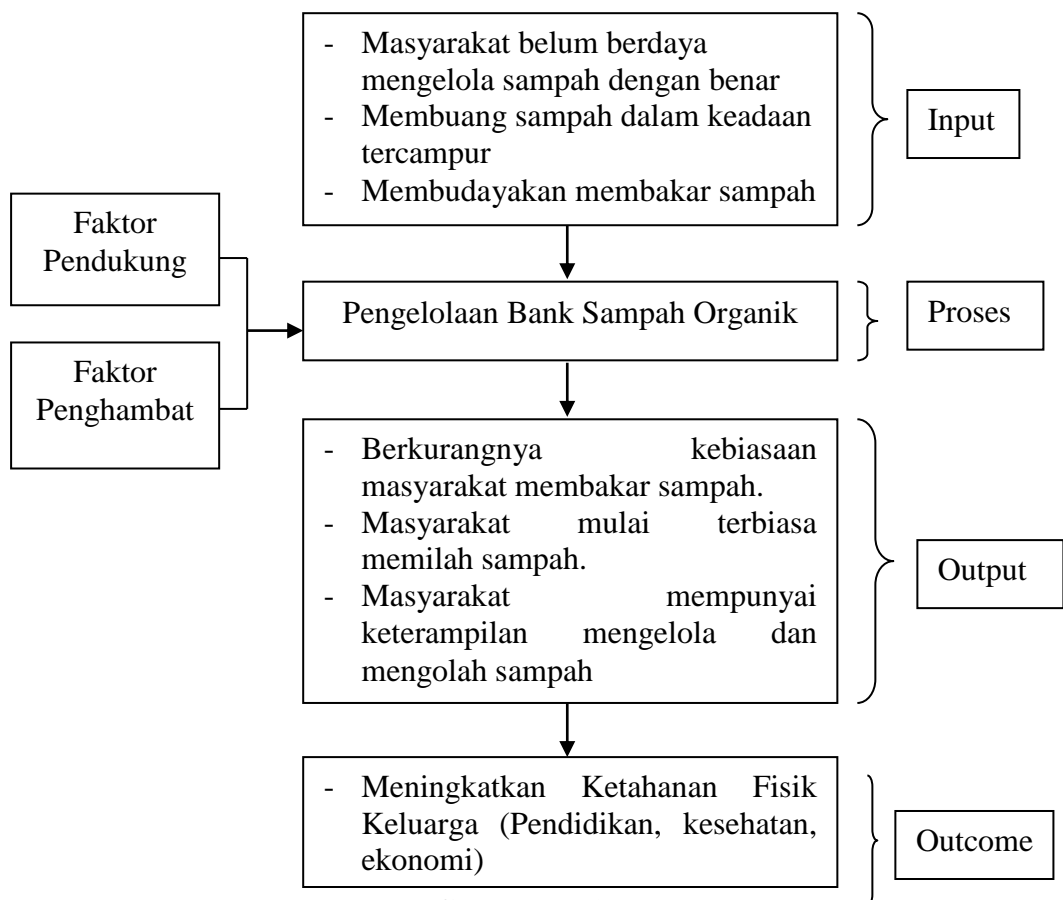
C. Kerangka Konseptual

Masyarakat Dusun Pasirpeuteuy masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara tradisional yaitu dengan membakar dan menimbunnya dalam keadaan tercampur antara sampah organik dan anorganik. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan baik udara maupun tanah. Karena keprihatinan akan hal itu maka didirikanlah Bank Sampah. Program-program yang ada di Kampung KB yaitu Program Kependudukan, Program KB KR dan Program pembangunan keluarga.

Menurut Notoatmodjo (2017:191), pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan bank sampah organik merupakan program untuk pembangunan keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016:6) menyatakan bahwa “Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat maupun negara”.

Bank Sampah di Dusun Pasirpeuteuy merupakan suatu wadah kegiatan pembelajaran dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Bank sampah Dusun Pasirpeuteuy memiliki

program kegiatan pengelolaan sampah diantaranya program pupuk organik dan budidaya maggot (jenis belatung yang dapat digunakan untuk pakan ternak karena memiliki protein yang tinggi). Adanya program pengelolaan sampah di sana bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat serta memberikan keterampilan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengelola sampahnya dengan bijaksana. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah diharapkan kebiasaan masyarakat untuk membakar sampah dapat berkurang, masyarakat dapat terbiasa memilah sampah, dan masyarakat dapat memiliki keterampilan mengelola dan mengolah sampah dengan benar agar terwujud lingkungan yang bersih dan sehat, berkurangnya polusi udara, serta bertambahnya pendapatan masyarakat dari hasil menabung sampah sebagai wujud dari ketahanan keluarga.



Gambar. 2.1.
Kerangka Konseptual
 (Sumber : Suwerda, 2016)

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan bank sampah organik pada Program Kampung KB Mandiri Gotong Royong di Dusun Pasirpeuteuy Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana ketahanan fisik keluarga pada Program Kampung KB Mandiri Gotong Royong di Dusun Pasirpeuteuy Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?